

## ***Open Government dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah***

**Pesi Suryani<sup>1</sup>, Anton Robiansyah<sup>2</sup>**

*1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis** : Pesi Suryani

**E-mail** : pesi@ecampus.ut.ac.id

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana peran prinsip-prinsip open government dalam mendorong kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan semi-structured interview. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah aparatur sipil yang telah bekerja lebih dari lima tahun pada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Data dianalisis menggunakan analisis konten dengan bantuan Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software yaitu Nvivo 11. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip open government memiliki peran dalam peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Adanya partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas dari para aparatur pengelola keuangan daerah dapat mendorong tercapainya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Implikasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat terus mengaplikasikan prinsip-prinsip open government dalam setiap pelaksanaan pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami atau mengeksplorasi peran prinsip-prinsip open government dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sehingga informasi yang didapatkan hanya gambaran secara umum. Selain itu, penelitian menggunakan variabel integritas sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas.

**Kata kunci** – *Open Government; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah*

### ***Abstract***

*This research aims to explore more deeply how the role of open government principles in encouraging the financial performance of the Central Bengkulu Regency Regional Government. This study uses descriptive qualitative methods with semi-structured interviews. The criteria of informants in this study is a civil apparatus that has worked for more than five years in the government of Central Bengkulu Regency and is directly involved in the financial management of central Bengkulu Regency. Data is analyzed using content analysis with the help of Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, Nvivo 11. The results of this*

*study revealed that the application of open government principles has a role in improving the financial performance of the Central Bengkulu Regency Regional Government. The existence of public participation, accountability, transparency and integrity of regional financial management apparatus can encourage the achievement of good local government financial performance. The implication of this research is that the Central Bengkulu Regency Regional Government can continue to apply the principles of open government in every government implementation in order to improve regional financial performance. This research uses qualitative approaches to explore or explore the role of open government principles in improving regional financial performance. While previous research used quantitative methods so that the information obtained is only a general picture. In addition, research uses integrity variables while in previous studies only use public participation, transparency and accountability variables.*

**Keywords** - *Open Government; Financial Performance; Local Government*

## PENDAHULUAN

Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (Kapoh et al., 2020; Sagita et al., 2018). Saat ini masyarakat menuntut pemerintah lebih terbuka dan memberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi kinerja pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah *open government*. Dengan adanya perkembangan pengetahuan, teknologi dan pengaruh globalisasi menjadikan konsep *open government* semakin dituntut oleh publik untuk diimplementasikan. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka terhadap dana publik yang mereka kelola.

*Open Government* merupakan bentuk transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta bentuk ketanggapian pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan (OECD, 2016). Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep *open government* sangat mengutamakan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Heny & Nurdin, 2018; Manghayu, 2018; Ngakil & Kaukab, 2020). Konsep *open government* harus diterapkan atau diimplementasikan pada setiap level pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik oleh pemerintah (Mualifu et al., 2019 ; Nasution, 2018). Masyarakat merupakan bagian dari stakeholder dalam system pemerintahan yang memiliki hak memperoleh informasi yang valid dan andal terkait dana public yang dikelola oleh pemerintah dan harus diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi, baik dalam menyampaikan pendapat, ide-ide maupun kritik kepada pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil mereka di badan legislatif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat (1) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan segala aspek yang diprioritaskan oleh masing-masing daerah (Hanafiah et al., 2016). Suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang baik memiliki ciri dari kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma & Susanto, 2010). Artinya, suatu daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan, menggunakan, dan mengelola keuangan sendiri dengan baik untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini terkait bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mampu melaksanakan elemen-elemen manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan seperti korupsi, penggelapan asset ataupun bentuk penyalahgunaan lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah dan dapat menyengsarakan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Sari & Mustanda (2019), pemerintah daerah yang mengelola keuangannya dengan baik akan memberikan dampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa kinerja adalah output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan menurut Bastian (2006: 273) kinerja merupakan cerminan dari tercapainya pengimplementasian suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam rangkai memenuhi kebutuhannya untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Kinerja suatu individu atau organisasi hanya bisa diketahui jika mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan (Apriadi et al., 2020; Gede & Priartini, 2018). Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tolak

ukur yang jelas tentu kinerja suatu organisasi tidak dapat diketahui atau diukur. Kinerja keuangan suatu daerah dapat diindikasikan melalui hasil audit BPK atau opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun opini audit yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 5 tahun terakhir dapat kita lihat sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Opini Audit BPK RI terhadap Kab. Bengkulu Tengah**

<i>Tahun</i>	<i>Opini</i>
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

*Sumber: bengkulu.bpk.go.id*

Dari tabel diatas dapat kita lihat adanya penurunan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian dengan status Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Tuntutan ganti rugi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini dikarenakan adanya beberapa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah. Status TGR pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah ini mengindikasikan bahwa masih kurang baiknya kinerja keuangan daerah tersebut. Adanya latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, factor apa saja yang dapat melatarbelakangi terjadinya penurunan opini tersebut dan apakah penurunan opini tersebut menunjukkan buruknya kinerja keuangan suatu daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah bukan hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan saja namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-keuangan, dalam penelitian ini peneliti ingin mengeksplere lebih dalam faktor-faktor non keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu daerah dengan menggunakan konsep *open government*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplere lebih dalam bagaimana peran prinsip-prinsip *open government* dalam mendorong kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Stakeholder Theory***

Ada beberapa pandangan mengenai stakeholder ini, diantaranya Freeman (1984), mendefinisikan stakeholder sebagai suatu kelompok atau individu yang

mampu mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. menurut Mianti & Fachruzzaman (2020), stakeholder suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai interes atau kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah organisasi karena tindakan, tujuan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut dapat mempengaruhinya.

Pemerintah adalah elemen dari salah satu bagian yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya, dalam konteks ini berarti pemerintah harus menjalankan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah sistem sosial. Setiap Tindakan atau kebijakan yang diambil oleh tiap-tiap elemen dari pemangku kepentingan atau stakeholder akan saling memberikan dampak satu dengan lainnya.

Pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya memiliki peranan krusial dalam proses memajukan suatu daerah. Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat menentukan kemajuan suatu daerah (Verawaty et al., 2020). Masyarakat memiliki kepentingan terhadap bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka, jika pemerintah mampu mengelola keuangan dengan baik maka hasilnya nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan dan penyediaan fasilitas umum yang berkualitas. Kepentingan masyarakat yang dimaksud yaitu anggaran atau dana yang di sahkan oleh pemerintah itu merupakan representasi dari kebutuhan yang ada di tengah masyarakat. Pelayanan, strategi, dan operasi yang digunakan dalam rangka memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggungjawab bersama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai stakeholder pemerintah yang mempunyai tugas sebagai agen utama (Taufiqurokhman & Satispi, 2018). Aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, dan prosedur tata laksana merupakan tiga hal yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan operasi pemerintah.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (Bastian, 2006). Menurut (Nurulita et al., 2018), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang maupun instansi/Lembaga/perusahaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Tujuan dari pelaporan kinerja keuangan adalah untuk mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah yang menunjukkan efisiensi dan efektifitas untuk menyelaraskan pengeluaran pemerintah agar sesuai dengan yang dianggarkan (Tama & Adi, 2018). Selain itu, penilaian kinerja keuangan

pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah, melihat manfaat dan dampak kegiatan yang dilaksanakan bagi masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja diperiode selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut. Kinerja keuangan merupakan suatu penentuan secara periodic efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Onibala et al., 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

### ***Open Government***

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengartikan bahwa *open government* atau pemerintahan yang Terbuka sebagai sebuah bentuk transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan (OECD, 2016). Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep *open government* menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan (Heny & Nurdin, 2018; Dharma & Kasim, 2021). Konsep *open government* harus diterapkan atau diimplementasikan pada setiap level pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. OECD menjelaskan empat prinsip yang terdapat dalam *open government*, yaitu:

1. Partisipasi Publik
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Integritas

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan *semi-structured interview* dengan menggunakan alat bantu *voice recorded* dalam rangka memudahkan proses transkripsi. Menurut Creswell dalam (Raco, 2018) metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Peneliti biasanya menginterview partisipan atau informan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas agar dapat memahami gejala sentral yang dimaksud. Kemudian mengumpulkan informasi yang disampaikan informan yang biasanya berupa kata atau teks dan selanjutnya data atau informasi tersebut dianalisis (Raco, 2018). Peneliti membuat *interpretasi* untuk menangkap arti yang terdalam dari data-data yang diperoleh sebelumnya.

*Interview* dilaksanakan terhadap informan dengan kriteria telah bekerja lebih dari lima tahun pada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Informan dalam penelitian ini ada empat orang, yakni SJ (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan), EH (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan), MG (Asisten Administrasi Umum) dan RS (Bendahara Pengeluaran). Data dianalisis menggunakan analisis konten dengan bantuan *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software* yaitu Nvivo 11.

## **PEMBAHASAN**

Dalam teori *stakeholder* semua kebijakan yang diambil atau tindakan yang dilakukan oleh tiap-tiap para pihak atau *stakeholder* akan saling memberikan dampak satu dengan lainnya, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga akan mempengaruhi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam sistem pemerintahan. Maka dengan demikian diharapkan para pihak terkait untuk dapat sama-sama memberikan kontribusi untuk memajukan daerahnya dengan berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, serta sama-sama aktif dalam mengawasi kinerja dari kebijakan yang telah diambil tersebut demi terlaksananya prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (Suryani, 2019). Partisipasi merupakan bagian penting dalam suksesnya implementasi otonomi daerah, karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi (Achmadi, 2002).

Berdasarkan hasil *in-depth interview* ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan wadah atau ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh informan SJ dan EH. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukan, saran, ataupun usulan lainnya, baik itu masalah kebijakan penyusunan rencana program pembangunan ataupun usulan lainnya. Masukan dari masyarakat akan dihimpun oleh Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Masukan-masukan itu akan dipelajari oleh BAPPEDA, dan Pemerintah Daerah bersama TAPD. Setelah itu pemerintah daerah akan menentukan skala prioritas, mana paling mendesak dan betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat dalam rangka untuk mempercepat proses pembangunan, dan pelaksanaannya tergantung dengan kemampuan dana atau keuangan Pemerintah daerah.

Selain itu partisipasi masyarakat ini merupakan wujud pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat membuat pemerintah lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran, pemerintah membuat perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan mengelola keuangan daerah sebaik mungkin. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa

menyampaikan ide atau pendapat dalam kegiatan musrenbang baik ditingkat Desa, Kecamatan ataupun tingkat Kabupaten, selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui sistem *e-planning* atau website (<https://bengkulutengahkab.go.id/>) yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam teori *stakeholder* adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan para *stakeholder* agar dapat mewujudkan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang mereka kelola kepada para *stakeholder* lainnya karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil *in-depth interview* yang dilakukan terhadap informan SJ dan EH mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur, dan regulasi atau aturan yang ada. Kegiatan atau program hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah tertera di DPA dan sesuai dengan ketersediaan dana, jika dana tidak tersedia tidak mungkin kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan pada pelaksanaannya pemerintah daerah tidak bisa mengalihkan suatu anggaran kegiatan ke kegiatan lainnya, kecuali ada sesuatu hal yang sangat genting seperti terjadi bencana alam. Jika ada kegiatan baru maka akan diajukan di tahun berikutnya, pemerintah daerah berusaha untuk selalu taat asas. Setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum atau regulasi yang ada. Program atau kegiatan dilaksanakan berdasarkan pada dokumen DPA yang telah disusun, dimana pada dokumen tersebut telah mencantumkan secara jelas anggaran yang dibutuhkan, output dan outcome yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Transparansi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pihak eksekutif dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh *stakeholder* lainnya seperti DPRD dan masyarakat umum. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk menuntut keterbukaan dari pemerintah yang mengelola dana publik, seperti apa dana tersebut dikelola dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan kebijakan dan implementasinya serta hasil yang dicapai pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan (Suryani, 2019).

Hasil *in-depth interview* yang dilaksanakan bersama narasumber atau informan MG dan RS mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan akses kepada para pihak, baik masyarakat umum maupun media massa untuk mendapatkan informasi baik terkait keuangan maupun non keuangan. Pihak terkait dapat memperoleh informasi tersebut melalui *website* pemerintah daerah,

Badan Arsip Daerah ataupun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait langsung. Selain itu, informan RS juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga telah bekerja sama dengan pihak media untuk mempublikasikan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Integritas para pengelola keuangan daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jika pengelola keuangan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, maka akan dapat mencegah aparatur pengelola keuangan ini untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan daerah yang mereka kelola. Hasil *in-depth interview* yang dilakukan terhadap informan RS dan MG mengungkapkan bahwa integritas dari para pengelola keuangan daerah memiliki korelasi terhadap kinerja keuangan daerah. Integritas para aparatur pengelola keuangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Karena mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya integritas dari mereka maka tujuan tidak akan tercapai. Tanpa niat dan ikhtikak baik dari para pengelola keuangan maka akan memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan. Bentuk integritas para aparatur pengelola keuangan daerah ini dapat berupa mengikuti nilai-nilai yang ada di instansi, tidak melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengikuti kode etik yang telah diatur oleh pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip dalam open government, yakni terdiri dari partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara menyampaikan aspirasi melalui kegiatan musrenbang atau melalui *system e-planning*. Dalam hal akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur, dan regulasi atau aturan yang ada. Setiap kegiatan ataupun program yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan prosedur yang ada, tidak ada conflict interest. Sebagai bentuk transparansi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan akses kepada para stakeholder untuk memperoleh informasi terkait keuangan maupun non keuangan baik melalui website pemerintah daerah maupun langsung ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait langsung. Selain itu, pemerintah juga telah bekerjasama dengan beberapa media massa untuk mempublikasikan setiap kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Integritas dari aparatur pengelola keuangan daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Integritas yang tinggi

dari pengelola keuangan akan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan daerah yang mereka kelola. Para aparatur pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjukkan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk integritas para aparatur pengelola keuangan daerah ini berupa mengikuti nilai-nilai yang ada di instansi, tidak melakukan Tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengikuti kode etik yang telah diatur oleh pemerintah.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan pemerintah daerah lainnya dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip *open government* dalam menjalankan pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah sebagaimana konsep yang ada pada teori stakeholder bahwa segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi stakeholder lainnya, maka diperlukan kerjasama dari para pihak terkait.

#### Daftar Pustaka

- Achmadi, A., Muslim, M. dkk. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba.
- Apriadi, D., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2020). Performance Analysis of Employees in Kesbangpol Office Kaur District. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*, 1(2), 97–104.
- Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Dharma, A. A. S., & Kasim, A. (2021). Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 105–125.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gede, K. G., & Priartini, P. S. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimoderasi Oleh Motivasi Kerja Pada Bpr Se-Kecamatan Sukawati Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 1107.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi di SKPK pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi*, 5(4), 77–86.
- Heny, A., & Nurdin, M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–17.
- Kapoh, L. E. C., Rotindulu, D. C., & Maramis, M. T. B. (2020). *Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado*. 20(03), 88–98.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(5), 95–115.
- Mianti, R., & Fachruzzaman. (2020). Analysis Financial Performance of Regional Government in Bengkulu Province. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2),

164–174.

- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336.
- OECD. (2016). OECD Kajian Open Government - Indonesia Hal-Hal Pokok. *OECD Publishing*, 1–24.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Sagita, A. D., Musnadi, S., & Majid, M. S. A. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata. *Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 2(1), 11–21.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Suryani, P. (2019). Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi Dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 9(1), 33–44.
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). The Influence of Regional Head Characteristics, Government Size, and Audit Findings on Regional Financial Performance. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik. In *Umj Press 2018*.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37.